

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Seperti pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada saat akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia:

*“Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Didalam jaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri.”<sup>1</sup>*

Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta merta membuat Indonesia terlepas dari para penjajah. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, sesuai Perjanjian Wina pada 1942 setelah Jepang meninggalkan negara jajahannya, maka wilayah jajahannya diserahkan kepada sekutu.<sup>2</sup> Masuknya tentara sekutu yang diboncengi oleh *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) mengakibatkan banyaknya pertempuran fisik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam kurun waktu 1945-1949, Indonesia harus berjuang kembali melawan para penjajah,

---

<sup>1</sup> Dikutip dalam Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 93.

<sup>2</sup> Tuk Setyohadi, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: CV Rajawali Corporation, 2002), hlm. 73.

mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai sebelumnya. Periode ini disebut dengan periode perang kemerdekaan. Indonesia tentu saja harus terus menjaga keutuhan serta keamanan negaranya. Segala upaya pertahanan diberbagai sektor dilakukan untuk tetap menjaga Indonesia dari penjajahan.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>3</sup> Sistem pertahanan negara bersifat semesta, sehingga melibatkan seluruh warga, negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertahanan negara merupakan kekuatan bersama baik sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam menjamin integritas, perlindungan dan kepentingan wilayahnya.

Pertahanan Indonesia melawan penjajah melibatkan seluruh elemen, baik masyarakat maupun para prajurit dalam angkatan bersenjata yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) diakses dari laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>, pada 22 Desember 2019, pukul 16.30 WIB.

menjadi garda terdepan. Istilah keprajuritan lebih menekankan kepada suatu “sikap mental” (*state of mind*).<sup>4</sup>

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap peperangan pasti ada korban yang berjatuhan. Korban dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949 tidaklah sedikit. Ada yang harus merengang nyawa di medan peperangan dan ada juga yang menjadi cacat setelah turun langsung dalam medan peperangan. Pahlawan yang tidak banyak dikenal masyarakat, namun memiliki aksi nyata dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak banyak penulisan mengenai bagaimana kehidupan para pejuang yang cacat akibat peperangan dan cara mereka tetap berjuang setelah keadaan yang tidak lagi sama, tidak banyak yang menyorohtnya.

Pada 1946 di Malang, dibentuk organisasi yang menaungi para cacat pejuang yang disebut dengan invaliden atau bekas pejuang. Sebagian besar anggotanya adalah para pejuang yang mengalami kecacatan parah hingga yang sedang dirawat di rumah sakit. Organisasi tersebut bernama Ikatan Invaliden Indonesia yang diprakarsai oleh Asmara Hady.<sup>5</sup> Akan tetapi, pada 1947 ketika Agresi Militer Belanda I, mereka yang masih sanggup untuk berjuang, kembali ke dalam kesatuannya masing-masing.

Pembentukan organisasi invaliden pada 1946 membuat daerah-daerah lain membentuk sendiri organisasinya untuk menampung para pejuang

---

<sup>4</sup> Suatu rasa dalam hati nurani yang menyadari bahwa dalam hidup sebagai manusia dan bangsa perlu adanya rasa tanggung jawab untuk membela sesama manusia dan bangsa dari segala sesuatu yang zalim, seperti ketidakadilan dan nafsu kolonialisme. (Lihat Tuk Setyohadi, *op.cit*, hlm. 74).

<sup>5</sup> BPHP Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, *Seperempat Abad Korps Cacat Veteran Republik Indones*, (Jakarta: PT. PENCA, 1975), hlm. 43.

cacat atau bekas pejuang. Pada 1950, para cacat pejuang atau bekas pejuang harus dikeluarkan dari kesatuannya. Hal tersebut membuat para cacat pejuang bersatu dan membuat organisasi nasional dengan nama Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia. Organisasi cacat veteran dalam perjalanannya beberapa kali berganti nama untuk mencari penyesuaian nama yang tepat bagi mereka. Pada 1952 Ikatan Invaliden Seluruh Indonesia berubah menjadi Ikatan Penderita Tjatjad Indonesia kemudian pada 1956 pada Kongres ke-3 nama organisasi kembali berubah menjadi Ikatan Tjatjat Veteran Indonesia hingga akhirnya pada 1966 menjadi perubahan nama terakhir yaitu Korps Cacat Veteran Republik Indonesia.

Pada 1956, berdiri sebuah organisasi bekas pejuang seluruh Indonesia dan membentuk organisasi bekas pejuang seluruh Indonesia yang bernama Legiun Veteran Indonesia dan penggunaan istilah bekas pejuang diubah menjadi veteran.<sup>6</sup> Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk

---

<sup>6</sup> Legiun Veteran Republik Indonesia, *Selayang Pandang Legiun Veteran Republik Indonesia*, (Jakarta: LVRI, 2010), hlm. 3.

melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Namun, biarpun sudah terbentuk organisasi veteran seluruh Indonesia dan organisasi cacat veteran menjadi anak organisasi yang bernaung dibawah LVRI, secara kronologis organisasi cacat veteran merupakan organisasi tertua dan jauh lebih dulu sudah ada. Berbeda dengan organisasi veteran seluruh Indonesia, organisasi cacat veteran anggotanya hanya para prajurit pejuang kemerdekaan atau veteran pejuang kemerdekaan. Veteran Pejuang Kemerdekaan adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berperan aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Hubungan organisasi veteran dengan organisasi veteran luar negeri juga lebih dulu dilakukan oleh organisasi cacat veteran. Hubungan dengan organisasi veteran luar negeri dimulai pada 1953 bergabung dengan *World Veterans Federations* (WVF) yang kemudian ketika Legiun Veteran Republik Indonesia terbentuk, keanggotaan organisasi cacat veteran dalam WVF diserahkan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai organisasi induk veteran di Indonesia.<sup>9</sup>

Jumlah anggota organisasi cacat veteran hingga 1980 berjumlah kurang lebih 5000 yang seluruhnya merupakan veteran pejuang

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) diakses dari laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5508>, pada 22 Desember 2019, pukul 16.30 WIB

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> BPHP Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 133.

kemerdekaan.<sup>10</sup> 5000 cacat veteran pejuang kemerdekaan yang terus berusaha untuk bisa berguna bagi negara tercintanya.

Rasa kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, keputusan akan keadaan hingga ketakutan tidak diterima di masyarakat membuat para cacat veteran bersatu dan saling menguatkan. Berbagai kegiatan pendidikan, pembinaan kesehatan, dan alat-alat bantu hingga kegiatan ekonomi dijalani bersama-sama untuk menguatkan keberadaan para cacat veteran dan menyiapkan para cacat veteran untuk kembali ke masyarakat, semangat para cacat veteran masih jauh lebih tinggi untuk mereka menjadi tetap berguna bagi negara.

Sejauh ini, tema penulisan sejarah mengenai organisasi cacat veteran masih sangat jarang penulis temukan. Jika ada, hanya membahas mengenai satu orang saja atau implementasi kebijakan pemerintah terhadap para veteran. Penelitian terkait yang penulis temukan adalah penelitian Sri Purwaningsih dari Universitas Sebelas Maret yang berjudul *Tanggung Jawab Negara dalam Peningkatan Kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surakarta*. Penelitian kedua yang penulis temukan adalah penelitian skripsi Afri Yuni Melati yang berjudul *Makna Hidup Lansia yang Berstatus Veteran (Studi Kasus terhadap Seorang Lanjut Usia yang Berstatus Veteran Di Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, Jakarta Timur)*. Namun, kedua penelitian yang penulis temukan lebih memfokuskan kepada implementasi kebijakan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 51.

negara terhadap para veteran pejuang kemerdekaan dan memfokuskan dari sisi psikologis dari kehidupan seorang cacat veteran bukan mengenai terbentuk dan berkembangnya organisasi cacat veteran seperti penelitian ini.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dasar pemikiran di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah awal terbentuk hingga terpenuhinya cita-cita dari pembentukan organisasi cacat veteran. Secara spasial, penelitian ini membahas organisasi cacat veteran dalam lingkup nasional. Sedangkan secara temporal, batasan waktu penelitian ini adalah 1946-1983. Tahun 1946 dipilih karena pada tahun ini merupakan tahun awal berdirinya organisasi cacat veteran di Indonesia dengan nama Ikatan Invaliden Indonesia. Tahun 1983 dipilih sebagai pembatasan temporal karena pada tahun ini merupakan titik tahun terpenuhinya kesejahteraan para anggota cacat veteran yang diperjuangkan sejak awal pembentukan organisasi. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap para bekas pejuang atau veteran pejuang kemerdekaan.

Berdasarkan uraian di atas, memunculkan beberapa pertanyaan yang penulis rumuskan, yaitu:

- a. Bagaimana awal mula terbentuknya organisasi cacat veteran di Indonesia dalam kurun waktu 1946-1950?

- b. Bagaimana perkembangan organisasi cacat veteran di Indonesia dalam kurun waktu 1950-1983?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan awal pembentukan organisasi cacat veteran pada tahun 1946-1950 dan perkembangannya dalam kurun waktu 1950-1983.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan memiliki kegunaan:

- a. Secara teoritis, penelitian ini tidak menghasilkan teori baru melainkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian dan pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan organisasi cacat veteran serta bagaimana Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan sejarah militer Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai organisasi cacat veteran, selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan memberikan gambaran kembali mengenai perjuangan seluruh anggota bagi organisasi cacat veteran.

## D. Metode dan Bahan Sumber

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini meliputi empat tahap penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>12</sup>

Langkah awal dalam penelitian ini adalah heuristik. Heuristik adalah proses pencarian sumber sejarah yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, sumber dan data diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu menelusuri sumber dan data yang ada baik sumber primer maupun sekunder dari instansi terkait atau hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai organisasi cacat veteran di Indonesia.

Pada tahap heuristik penulis mengunjungi Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta untuk menelusuri studi tentang organisasi cacat veteran namun ternyata belum ada studi yang membahas hal tersebut, tetapi penulis menemukan sumber-sumber lain yang terkait dengan organisasi cacat veteran dan sejarah pertahanan di Indonesia.

Penelusuran penulis selanjutnya adalah Perpustakaan Nasional. Penulis juga menemukan sumber-sumber yang terkait dengan pertahanan nasional dan organisasi cacat veteran. Selanjutnya penulis mengunjungi Perpustakaan Universitas Indonesia, terdapat cukup banyak sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian namun masih minim sumber yang

---

<sup>11</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 18.

membahas mengenai organisasi cacat veteran di Indonesia. Tempat terakhir yang penulis kunjungi adalah Kantor Korps Cacat Veteran Republik Indonesia di Jalan Tambak 2 No.11A, RT.3/RW.5, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320. Di tempat ini penulis banyak sekali menemukan sumber-sumber utama yang dibutuhkan karena di tempat ini menyimpan banyak sumber berbentuk arsip atau dokumen-dokumen yang sezaman dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang sezaman. Selain sumber primer, penulis juga menggunakan sumber sekunder yaitu sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini digunakan agar penulis dapat memperoleh data tambahan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan.

Tahap selanjutnya yang penulis lakukan setelah mendapatkan sumber-sumber yang relevan yaitu pengujian terhadap data atau sumber sejarah tersebut. Pada tahap ini dikenal dengan tahap kritik atau pengujian terhadap data atau sumber yang didapat sehingga menghasilkan fakta sejarah. Data atau sumber yang didapat dikritik baik secara ekstern maupun intern. Kritik ekstern adalah pengujian terhadap aspek-aspek luar dari data dan sumber yang didapat. Kritik ekstern bertujuan untuk menilai otentisitas atau keaslian sumber sejarah berdasarkan bahan dan bentuk sumber, umur dan asal

dokumen.<sup>13</sup> Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan cara memperhatikan kondisi fisik data atau sumber.

Selanjutnya adalah kritik intern, kritik intern adalah pengujian untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya.<sup>14</sup> Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan cara membandingkan isi data atau sumber yang didapat dengan data atau sumber lain.

Tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Pada tahap ini penulis menafsirkan, merangkai, dan menghubungkan fakta-fakta yang didapat agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi. Historiografi adalah proses penulisan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber dalam bentuk penulisan sejarah dan menjadi sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji. Model penulisan dalam penelitian ini adalah model penulisan sejarah naratif (deskripsi-naratif) dimana penelitian ini menggambarkan mengenai “apa”, “siapa”. “kapan” dan “dimana”.

## **2. Bahan Sumber**

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Bapak Soepranoto Prawiro Wisastro yang merupakan Ketua Umum Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, arsip-arsip buku *Majalah Kenang-kenangan Invaliden tahun 1950*, *Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1950*, *Peraturan*

---

<sup>13</sup> Ismaun, *Sejarah sebagai Ilmu*, (Bandung: Historia Utama Press, 2005), hlm. 50.

<sup>14</sup> *Ibid.*

*Pemerintah No.6 Tahun 1954*, dokumen-dokumen keputusan-keputusan pada saat konferensi dalam rentang waktu 1946-1966.

Selain sumber primer, sumber sekunder juga akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Surat kabar nasional berbahasa Indonesia yaitu Surat Kabar Merdeka, Kedaulatan Rakjat dan Bandung Post.
- b. Buku teks tematik yang membahas mengenai sejarah militer, sejarah pertahanan nasional, sejarah Indonesia awal kemerdekaan dan yang membahas mengenai veteran.
- c. Wawancara dengan mantan pengurus harian pusat Korps Cacat Veteran Republik Indonesia yaitu Bapak Kolonel (Purn) M.R. Ronni Muaya, S.A.
- d. Jurnal, Skripsi dan Tesis.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penyajian hasil penelitian “Organisasi Cacat Pejuang Kemerdekaan Indonesia: Dari Ikatan Invaliden Indonesia Hingga Korps Cacat Veteran (1946-1983)” agar mudah dipahami dan dapat diperoleh gambaran dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis menyusun secara sistematis hasil penelitian ini dalam empat bab yaitu:

Bab pertama dalam skripsi ini mengemukakan secara rinci mengenai dasar pemikiran yang menjadi alasan penulis sehingga tertarik mengkaji penelitian ini menjadi skripsi. Kemudian pada bab ini juga dibahas mengenai perumusandan

pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai pembentukan kesatuan militer di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga terjadinya perang kemerdekaan Indonesia dalam kurun waktu 1946-1949. Perang kemerdekaan Indonesia yang mengakibatkan banyaknya korban perang merupakan latar belakang dari berdirinya organisasi invaliden di Indonesia juga dibahas dalam bab ini. Bab ini membahas mengenai awal pembentukan dari organisasi-organisasi invaliden di Indonesia yang semula terbentuk bersifat kedaerahan.

Bab ketiga membahas mengenai perubahan-perubahan nama organisasi dan pengakuan organisasi secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, bab tiga juga membahas mengenai kegiatan-kegiatan dan perjuangan organisasi dalam upaya memberdayakan dan menyejahterakan para anggotanya.

Bab empat membahas mengenai kesimpulan. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab kedua dan ketiga. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas masalah yang telah dikemukakan dalam bab pertama.